

Kajian Literatur Standar Akuntansi dan Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik di Indonesia

Sudrajat Martadinata¹, Arya Zulfikar Akbar², Tri Satriawansyah³

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Sumbawa, ³Program Studi Teknik Sipil, Universitas Samawa
Email : sudrajat.martadinata@uts.ac.id, arya.zulfikar.akbar@uts.ac.id, trisatriawansyah@samawa-university.ac.id

Abstract: This research is motivated by the importance of accountability and transparency in the financial governance of political parties in Indonesia, which is an important foundation for a healthy democracy, but there is still a significant gap between existing regulations and financial reporting practices. The purpose of this study is to identify and review various accounting standards and financial reporting guidelines that have been implemented or proposed for political parties in Indonesia, analyze the conformity between political party financial reporting practices and the principles of accountability and transparency in public financial governance, and identify challenges and gaps in the implementation of political party financial reporting standards based on findings from academic and policy literature. The research method involves in-depth analysis with a literature review scoping approach. The results of the study indicate that in political party financial reporting, there are SAK and SAP that are applied, transparency and accountability are needed in their management, and understanding the challenges and gaps in the implementation of political party financial reporting standards. In conclusion, to improve accountability and transparency, this study recommends the development of special accounting standards for political parties, strengthening transparent regulations and audit mechanisms, increasing independent supervision, and increasing awareness of accountability. By systematically addressing these challenges, political parties can improve their effectiveness as democratic entities and contribute to the progress of society as a whole.

Keywords: Accountability, Transparency, Financial Reports, Political Parties, Accounting Standards

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan partai politik di Indonesia, yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat, namun masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dan praktik pelaporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengkaji berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan keuangan yang telah diterapkan atau diusulkan untuk partai politik di Indonesia, menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan public, dan mengidentifikasi tantangan dan celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik berdasarkan temuan dari literatur akademik dan kebijakan. Metode penelitian melibatkan analisis mendalam dengan pendekatan scoping literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaporan keuangan partai politik, terdapat SAK dan SAP yang diterapkan, diperlukan transparansi dan akuntabilitas di dalam pengelolaannya, serta memahami tantangan dan celah pelaksanaan standar laporan keuangan partai politik. Kesimpulannya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, penelitian ini merekomendasikan pengembangan standar akuntansi khusus untuk partai politik, penguatan regulasi dan mekanisme audit yang transparan, peningkatan pengawasan independen, serta peningkatan kesadaran akuntabilitas. Dengan mengatasi tantangan ini secara sistematis, partai politik dapat meningkatkan efektivitas mereka sebagai entitas demokrasi dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Laporan Keuangan, Partai Politik, Standar akuntansi

Pendahuluan

Akuntabilitas keuangan bagi partai politik di Indonesia sangat penting untuk memastikan transparansi dan kepercayaan publik. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dana publik yang efektif, di mana partai politik harus bertanggung jawab atas alokasi dan penggunaan sumber daya tersebut. Dalam konteks ini, laporan akuntabilitas keuangan dapat membantu mengurangi potensi korupsi serta meningkatkan integritas dan efisiensi pengeluaran publik (Hudaya et al., 2015; Setiorini et al., 2022). Selain itu, akuntabilitas ini berkontribusi dalam memperkuat demokrasi. Ketika partai politik menunjukkan transparansi tentang penggunaan dana mereka, hal ini mendukung partisipasi politik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan (Aspinall & Mietzner, 2019). Masyarakat yang sadar akan akuntabilitas keuangan partai politik dapat lebih mudah menilai kinerja mereka dan membuat keputusan yang lebih informasional pada saat pemilihan umum (Warburton, 2016).



Oleh karena itu, aspek akuntabilitas keuangan sangat esensial untuk keberlangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia.

Konteks pendanaan partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika politik yang kompleks dalam kerangka pemerintahan yang demokratis. Partai politik di Indonesia seringkali terhubung secara erat dengan kekuasaan politik, yang dapat memengaruhi cara pendanaan mereka (Slater, 2018). Keterhubungan ini menciptakan kebutuhan akan standar akuntansi yang spesifik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai. Standar akuntansi yang jelas akan membantu mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana yang dapat merusak integritas partai dan proses politik (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021).

Sistem penganggaran yang baik dan akuntabel dapat mendukung pertanggungjawaban partai politik terhadap pendanaannya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi (Hudaya et al., 2015). Tantangan dalam pelaporan keuangan, sering kali terkait dengan manipulasi atau penyembunyian informasi, memerlukan regulasi yang ketat untuk mendukung pengelolaan yang lebih transparan dalam pendanaan politik (Supatmi et al., 2019). Dengan demikian, adopsi standar akuntansi yang jelas dan konsisten menjadi sangat penting dalam mendukung integritas demokrasi di Indonesia.

2. Latar Belakang Akuntansi Partai Politik

2.1. Regulasi Keuangan Partai Politik di Indonesia

Kerangka hukum yang mengatur keuangan partai politik di Indonesia mencakup berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pembelanjaan politik. Pertama, undang-undang yang mengatur sumbangan keuangan kepada partai politik, seperti UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengharuskan partai untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana secara terperinci (Slater, 2018; Al Izzati et al., 2024).

Lebih jauh, pengumpulan dana dari sumbangan publik dan swasta diatur untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian menunjukkan bahwa politisasi anggaran dapat menyebabkan manipulasi pengeluaran untuk keuntungan politik, khususnya dalam tahun pemilihan (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021; Harymawan et al., 2020).

Selain itu, terdapat kebutuhan untuk membangun kapasitas dan sistem laporan yang meningkatkan akuntabilitas partai (Hudaya et al., 2015). Hal ini penting, mengingat partai politik sering bergantung pada dana internasional dan lokal, di mana kejelasan mengenai penggunaan dana sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik (Shalihah et al., 2022; Lewis & Hendrawan, 2019).

Di Indonesia, regulasi yang mengatur pelaporan keuangan sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keuangan publik. Salah satu undang-undang yang relevan adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan mewajibkan pelaporan yang akurat dan tepat waktu (Setiorini et al., 2022). Selain itu, pentingnya akuntabilitas juga ditekankan dalam pengelolaan laporan keuangan di tingkat lokal, seperti yang dijelaskan dalam penelitian mengenai penggunaan laporan akuntabilitas di pemerintahan lokal (Hudaya et al., 2015).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan dalam mengawasi pelaksanaan dan kepatuhan pelaporan keuangan agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki keterkaitan politik sering menghadapi pelanggaran dalam pelaporan keuangan, mengindikasikan perlunya penguatan regulasi untuk mencegah manipulasi (Habib & Muhammadi, 2018; Habib et al., 2017). Dalam konteks ini, penerapan prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan keuangan juga menjadi sorotan, sebagai bagian dari upaya transparansi dan tanggung jawab sosial perusahaan (Nainggolan et al., 2021). Oleh karena itu, melalui kombinasi peraturan undang-

undang dan pengawasan yang ketat, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di berbagai sektor.

2.2. Standar Akuntansi yang Relevan

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia untuk partai politik mengalami tantangan signifikan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Partai politik harus mengadopsi praktik akuntansi yang mematuhi SAK guna memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Selain itu, adanya hubungan politik dapat memengaruhi kinerja keuangan partai. Penelitian menunjukkan bahwa koneksi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan tata kelola, di mana partai yang memiliki koneksi politik lebih cenderung terlibat dalam transaksi terkait pihak terkait (Habib et al., 2017b). Akuntabilitas dalam laporan keuangan menjadi semakin penting ketika partai politik juga terlibat dalam penggalangan dana yang transparan dan bertanggung jawab, hal ini didukung oleh praktik CSR yang baik (Nainggolan et al., 2021). Dengan demikian, partai politik di Indonesia perlu memperkuat pengawasan internal dan menerapkan SAK secara konsisten untuk meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi.

2.3. Tantangan dalam Akuntansi Partai Politik

Akuntansi untuk partai politik dihadapkan pada sejumlah tantangan unik, terutama terkait dengan sumber pendanaan yang beragam dan sifat nirlaba mereka. Pendanaan yang berasal dari sumbangan individu, sponsor korporat, dan dukungan pemerintah menciptakan kompleksitas dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi keuangan, yang dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas (Nainggolan et al., 2021; Habib et al., 2017a). Keterlibatan politik sering kali berhubungan dengan penurunan standar akuntabilitas, di mana hubungan politik dapat mendorong manipulasi laporan keuangan dan transaksi yang tidak transparan (Habib et al., 2017b).

Institusi nirlaba yang beroperasi dalam konteks politik memiliki tanggung jawab untuk menyediakan laporan yang akurat dan transparan. Namun, pengaruh praktik "money politics" dalam pemilihan dapat menyebabkan pengembangan akuntabilitas yang lemah (Lewis & Hendrawan, 2019; Gonschorek, 2021). Meskipun sistem memiliki kerangka hukum yang diatur, pelaksanaannya dalam akuntansi partai politik sering kali tidak memenuhi harapan masyarakat dalam hal kejelasan dan integritas finansial (Slater, 2018; Wiguna & Khoirunurrofik, 2021). Tantangan-tantangan ini memerlukan penanganan serius untuk memastikan praktik akuntansi yang baik di lingkungan politik.

Akuntansi partai politik berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas ekonomi, yang sangat penting dalam konteks demokrasi di Indonesia. Transparansi ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang diterima dan dibelanjakan oleh partai politik dapat diakses secara publik, mendukung praktik pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi (Hudaya et al., 2015). Akuntabilitas ekonomi, di sisi lain, mengharuskan partai politik untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Pertanggungjawaban ini berkorelasi dengan peningkatan partisipasi politik, di mana masyarakat menjadi lebih sadar akan posisi dan tindakan partai dalam pengelolaan sumber daya (Usman et al., 2024). Penggunaan laporan akuntabilitas juga memainkan peran penting dalam mendukung dialog antara pemerintah dan warga negara, memfasilitasi umpan balik yang konstruktif terhadap kebijakan yang diambil. Dalam menghadapi tantangan politik yang kompleks, akuntansi yang transparan dan akuntabel dapat mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan serta meningkatkan stabilitas politik di Indonesia (Aspinall & Mietzner, 2019).

Penyediaan data tentang aset, kewajiban, dan aset bersih sangat penting dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keuangan di Indonesia. Pertama, data ini memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis kesehatan finansial entitas, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam investasi dan kebijakan publik

(Ni'mah et al., 2020). Kedua, dalam konteks korupsi dan penghindaran pajak, transparansi aset dan kewajiban adalah kunci untuk mencegah praktik-praktik buruk; informasi yang akurat dapat mengurangi ruang bagi aktor politik untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka. Selain itu, menyajikan data yang jelas mengenai aset bersih membantu dalam evaluasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, terutama dalam investasi social. Dalam lingkungan yang berisiko tinggi, seperti yang dihadapi Indonesia, penyediaan data yang komprehensif dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan stabilitas ekonomi (Habib & Muhammadi, 2018).

3. Perkembangan Terkini

Perubahan terkini dalam standar akuntansi dan regulasi terkait partai politik mencakup beberapa aspek penting. Terdapat pengaruh hubungan politik terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung meningkatkan pengeluaran CSR mereka. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan CSR dapat memengaruhi persepsi publik dan reputasi partai politik yang mengelola perusahaan-perusahaan tersebut (Faisal et al., 2023).

Kemudian, pengaruh pemilu terhadap penganggaran daerah menunjukkan pola siklus politik yang jelas, di mana pengeluaran pemerintah lokal dimanipulasi menjelang pemilihan untuk menarik suara. Selain itu, penerapan kebijakan kuota calon wanita bertujuan untuk meningkatkan representasi gender dalam politik, yang meski berjalan lambat, menunjukkan kemajuan dalam partisipasi politik wanita di Indonesia (Perdana & Hillman, 2020). Terakhir, integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja akuntansi juga menjadi faktor penting, karena meningkatkan akuntabilitas dan transparansi yang diperlukan dalam pengelolaan dana publik (Ni'mah et al., 2020).

Perdebatan mengenai kebutuhan akan pedoman khusus terkait politik di Indonesia semakin mendalam seiring dengan kompleksitas struktur pemerintahan dan partai politik. Dalam konteks demokrasi Indonesia, yang mengalami transisi signifikan setelah jatuhnya rezim Suharto, isu seperti konsolidasi kekuasaan, korupsi, dan transparansi menjadi sorotan utama. (Indra et al., 2023). Di sisi lain, isu keterwakilan perempuan dan implementasi kuota legislatif menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi politik wanita (Perdana & Hillman, 2020),

4. Signifikansi Penelitian

Penelitian memainkan peran krusial dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan dan transparansi partai politik di Indonesia. Melalui analisis hubungan antara koneksi politik dan transaksi antar pihak, Habib et al. menunjukkan adanya potensi ekspropriasi yang dapat merugikan transparansi keuangan (Habib et al., 2017a). Selain itu, pentingnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di kalangan perusahaan yang memiliki koneksi politik ditegaskan oleh penelitian yang mengaitkan praktik CSR dengan kinerja perusahaan, di mana transparansi dalam laporan dapat memberikan dampak positif terhadap reputasi serta meningkatkan kepercayaan (Faisal et al., 2023; Nainggolan et al., 2021).

Lebih lanjut, riset mengenai siklus anggaran politik dan pengaruhnya terhadap pengeluaran pemerintah lokal menyoroti bagaimana pemilu dan koalisi politik dapat memengaruhi pengelolaan sumber daya secara efisien, yang pada gilirannya memperbaiki akuntabilitas publik (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021). Dengan memahami dinamika ini, penelitian dapat membantu membangun kerangka kerja yang lebih baik untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi partai politik di Indonesia, yang sangat vital dalam perkembangan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengambilan keputusan kebijakan serta meningkatkan kepercayaan publik di Indonesia. Dalam konteks ini, reformasi terkait penurunan subsidi bahan bakar yang signifikan dan peningkatan pengeluaran untuk

infrastruktur dianggap sebagai langkah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat (Damuri & Day, 2015).

Selain itu, pemahaman terhadap hubungan politik dan kinerja perusahaan juga relevan, karena temuan menunjukkan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas yang lebih baik dapat meningkatkan reputasi pemerintah dan lembaga publik, memperkuat kepercayaan masyarakat (Setiorini et al., 2022). Kebijakan yang berlandaskan pada partisipasi publik, seperti model anggaran partisipatif, juga dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan kepercayaan terhadap institusi publik (Usman et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dan partisipasi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Kajian literatur bertujuan untuk menelaah standar yang ada, mengidentifikasi kesenjangan, dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut. Dalam konteks ini, studi-studi sebelumnya menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap pengaruh koneksi politik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja bisnis di Indonesia. Penelitian oleh Faisal et al. menekankan bahwa pengungkapan keberlanjutan berkontribusi positif pada reputasi perusahaan, yang menjadi salah satu standar penting dalam menilai kinerja perusahaan di pasar yang berkembang (Faisal et al., 2023). Selain itu, identifikasi kesenjangan dalam adopsi data besar dalam manajemen kinerja menunjukkan perlunya lebih banyak integrasi dalam proses organisasi untuk mempromosikan budaya berbasis data (Karina et al., 2025). Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menyoroti prinsip-prinsip yang ada tetapi juga menekankan kebutuhan untuk studi lebih lanjut mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi dalam konteks sosial dan politik di Indonesia, memungkinkan pengembangan yang lebih berkelanjutan (Karina et al., 2025).

5. Tujuan Penelitian

Kenapa ini penting untuk dilakukan? Karena dari berbagai latar belakang di atas, terdapat tujuan yang ingin dicapai di dalam pelaksanaan penelitiannya. Di bawah ini tujuannya disebutkan secara eksplisit sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan keuangan yang telah diterapkan atau diusulkan untuk partai politik di Indonesia
2. Menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik
3. Mengidentifikasi tantangan dan celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik berdasarkan temuan dari literatur akademik dan kebijakan

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini mengacu pada teori legitimasi. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi (termasuk partai politik) akan berusaha mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui tindakan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Penerapan standar akuntansi dan pedoman pelaporan adalah bagian dari strategi untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi.

Teori legitimasi organisasi menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk partai politik, berupaya mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui tindakan yang selaras dengan norma dan nilai yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan standar akuntansi dan pedoman pelaporan berfungsi sebagai bagian integral dari strategi untuk mendapatkan dan memperkuat legitimasi. Sebagai contoh, perusahaan yang terhubung secara politik yang melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat meningkatkan reputasi mereka di mata publik, yang selanjutnya berkontribusi pada legitimasi mereka di pasar (Nasih et al., 2020). Lebih lanjut, transparansi dalam pelaporan akuntansi mengurangi persepsi buruk yang

mungkin dihasilkan dari tindakan manipulatif, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi organisasi tersebut di mata masyarakat (Hendratama & Barokah, 2020).

Peran akuntabilitas dalam pelaporan juga sangat penting, di mana penerapan laporan akuntabilitas yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, memperkuat legitimasi dalam konteks politik. Dengan demikian, langkah-langkah akuntabilitas dan pelaporan yang tepat dapat dilihat sebagai alat strategis dalam upaya memperoleh dan memelihara legitimasi di kalangan pemangku kepentingan, khususnya dalam konteks organisasi publik dan politik di Indonesia (Lewis & Hendrawan, 2019). Relevansinya ialah dimana kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar akuntansi dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar akuntansi memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap partai politik. Integritas dalam laporan keuangan oleh partai politik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, yang esensial untuk membangun kepercayaan publik dalam sistem politik (Setiorini et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam laporan keuangan dapat mengurangi prasangka negatif terhadap korupsi dan manipulasi anggaran, yang sering menjadi permasalahan di kalangan partai politik Indonesia (Habib & Muhammadi, 2018).

Lebih lanjut, kekurangan dalam pelaporan keuangan dapat menyebabkan keraguan yang lebih besar dari publik, merugikan legitimasi partai. Penguatan standar akuntansi dalam pelaporan dapat memfasilitasi pengawasan yang lebih baik oleh pemilih dan meningkatkan kepercayaan dalam proses demokrasi (Aspinall & Mietzner, 2019). Oleh karena itu, penguatan pelaporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi merupakan kebutuhan strategis bagi partai politik untuk menjaga kredibilitas di mata publik dan mendorong partisipasi politik yang lebih aktif.

Metode

Metode penelitian dengan pendekatan *scoping literature review* merupakan alat penting dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang literatur yang ada dalam suatu bidang penelitian tertentu. Pembaruan metodologis terkini menyarankan bahwa *scoping reviews* harus dilakukan dengan kejelasan dan konsistensi dalam pelaporan serta penerapan metodologi yang standar (Peters et al., 2021; Peters et al., 2020). Hal ini bertujuan untuk mengkompilasi bukti yang beragam dengan cara yang sistematis, menyoroti berbagai jenis penelitian untuk memberikan insight yang lebih luas (Gupta et al., 2023).

Pendekatan ini berbeda dari *systematic reviews* yang cenderung lebih ketat dan berfokus, di mana *scoping reviews* memungkinkan eksplorasi area yang lebih luas dalam literatur dan merangkum temuan awal. Ini sangat bermanfaat dalam konteks penelitian politik di Indonesia, yang sering kali menghadapi dinamika yang kompleks dan beragam (Ashsyarofi, 2021; Sahide, 2022). Penelitian yang melibatkan latar belakang politik dan kebijakan publik di Indonesia menunjukkan bagaimana *scoping review* dapat membantu mengidentifikasi celah penelitian dan membantu merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik (Faisal et al., 2023).

Langkah-Langkah Utama dalam Scoping Review

Mengacu pada kerangka Arksey dan O'Malley (2005), yang telah diperbarui oleh JBI dan PRISMA-ScR, langkah-langkahnya adalah:

a. Identifikasi Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan harus luas untuk mencakup berbagai jenis bukti, misalnya: "*Apa saja standar akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan partai politik?*"

b. Identifikasi Studi Relevan

Menggunakan strategi pencarian sistematis di beberapa database (Google Scholar, Scopus, ProQuest, dll), dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas.

c. Seleksi Studi

Melibatkan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, diikuti dengan tinjauan teks lengkap, idealnya oleh dua peneliti untuk meminimalkan bias.

d. Ekstraksi dan Pemetaan Data

Data dari literatur yang dipilih diekstraksi dan diklasifikasikan berdasarkan kategori tema, metode, populasi, dll. Bisa disajikan dalam bentuk tabel atau peta konsep.

e. Sintesis dan Pelaporan Hasil

Menyajikan hasil secara deskriptif, tanpa evaluasi kualitas, dengan narasi tentang tren, kesenjangan, dan potensi penelitian lanjutan (Peters et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Bagian hasil dan pembahasan ini akan menyajikan analisis mendalam mengenai tantangan dan upaya perbaikan dalam praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia. Berdasar kepada tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga pembahasan ini akan mengupas berbagai aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknologi informasi, rendahnya kesadaran akuntabilitas, pengawasan yang tidak konsisten, serta kurangnya standar yang spesifik, dan bagaimana faktor-faktor ini saling terkait dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan partai politik. Selain itu, bagian ini juga akan mengeksplorasi celah-celah yang ada dalam pelaksanaan standar pelaporan, implikasi dari tantangan-tantangan tersebut, serta rekomendasi-rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan partai politik demi terwujudnya demokrasi yang lebih sehat.

1. Mengidentifikasi dan mengkaji berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan keuangan yang telah diterapkan atau diusulkan untuk partai politik di Indonesia.

Hal ini membantu menelusuri regulasi yang berlaku seperti Peraturan KPU, pedoman dari BPK, dan relevansi SAK ETAP atau SAK lainnya. Untuk memahami dan mengkaji berbagai standar akuntansi serta pedoman pelaporan keuangan yang diterapkan atau diusulkan untuk partai politik di Indonesia, penting untuk melihat konteks regulasi yang ada, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pedoman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta relevansi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan standar lainnya. Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai politik menjadi semakin relevan dalam mencegah tindak pidana korupsi yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Penelitian telah menunjukkan urgensi dari pengelolaan keuangan partai politik secara akuntabel dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan dana (Ashsyarofi, 2021).

Salah satu regulasi penting adalah Peraturan KPU No. 33 Tahun 2020, yang mengatur tentang pengelolaan keuangan partai politik. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana dan memastikan bahwa setiap partai politik dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dananya dengan baik. Dalam praktiknya, partai politik diharuskan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan, termasuk SAK ETAP (Ashsyarofi, 2021).

Penggunaan SAK ETAP merupakan solusi yang disarankan untuk partai politik sebagai standar akuntansi yang lebih sederhana dan relevan. SAK ETAP dirancang untuk memberikan panduan akuntansi yang jelas untuk entitas kecil dan menengah yang tidak memiliki akuntabilitas publik, termasuk partai politik di Indonesia. Hal ini memungkinkan partai politik

untuk menyusun laporan keuangan yang lebih transparan dan mudah dipahami. Partai politik juga diharuskan untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran mereka secara rinci, yang merupakan langkah penting dalam menegakkan akuntabilitas (Ashsyarofi, 2021).

Di samping itu, BPK juga memberikan pedoman yang mengatur audit keuangan untuk partai politik, yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman BPK menekankan pentingnya audit sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. BPK mendorong partai untuk segera melakukan audit terhadap laporan keuangan mereka untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau manipulasi (Ashsyarofi, 2021).

Terdapat banyak tantangan dalam penerapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan partai politik di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan praktik akuntansi yang memadai, yang sering terhalang oleh kapasitas dan sumber daya manusia yang terbatas. Banyak partai politik, terutama di tingkat daerah, mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan regulasi yang kompleks, sehingga berpotensi meningkatkan risiko korupsi. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk mendukung akuntabilitas keuangan partai politik.

Selain itu, tekanan dari kekuatan politik dapat mempengaruhi keuangan partai dan pelaporan mereka. Hubungan yang erat antara partai politik dan sektor pemerintahan dapat menciptakan keadaan yang memungkinkan terjadinya manipulasi finansial dan pelanggaran terhadap standar akuntansi. Di satu sisi, partai politik mungkin merasa terpaksa untuk menggunakan dana mereka dengan cara yang tidak transparan untuk menjaga kelangsungan kekuasaan (Ashsyarofi, 2021). Oleh karenanya, perlunya regulasi yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif dari lembaga-lembaga terkait.

Sebagai langkah proaktif, beberapa partai politik di Indonesia telah mulai mengadopsi sistem pelaporan keuangan yang lebih modern dan transparan. Penerapan teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akuntabilitas. Dengan memanfaatkan sistem informasi akuntansi yang canggih, partai politik diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan dan pelaporan keuangan mereka. Langkah ini tidak hanya membantu dalam memenuhi tuntutan regulasi tetapi juga memberikan kepercayaan kepada publik tentang integritas keuangan partai.

Mempertimbangkan tantangan yang ada, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan dukungan dan pelatihan bagi partai politik dalam penerapan standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Melalui program pelatihan yang berkelanjutan, partai politik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya, dapat memperkuat demokrasi di Indonesia.

Standar Akuntansi dan Pedoman Pelaporan Keuangan untuk Partai Politik di Indonesia: Analisis Mendalam

Saat ini, tidak ada standar akuntansi khusus yang secara eksplisit ditujukan untuk partai politik di Indonesia. Namun, terdapat beberapa standar dan pedoman yang relevan yang dapat diterapkan, meskipun dengan beberapa penyesuaian.

1. Standar Akuntansi Keuangan

SAK adalah standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Namun, karena SAK terutama ditujukan untuk entitas bisnis, penerapannya pada partai politik memerlukan pertimbangan khusus. Partai politik memiliki karakteristik unik sebagai organisasi nirlaba dengan sumber pendanaan yang beragam dan tujuan yang berbeda dari perusahaan komersial. SAK Umum dapat menjadi acuan. Menerapkan SAK secara langsung tanpa modifikasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak relevan atau tidak mencerminkan kondisi keuangan partai politik secara akurat. Misalnya, pengukuran kinerja keuangan partai politik tidak dapat diukur dengan metrik profitabilitas seperti pada perusahaan.

2. Sistem Akuntansi Pemerintahan
SAP adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah di Indonesia. SAP berbasis akrual telah diimplementasikan sejak 2015. Meskipun partai politik bukan entitas pemerintah, prinsip-prinsip dalam SAP, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi, dapat diadopsi. SAP dirancang untuk entitas pemerintah yang memiliki struktur dan proses yang berbeda dari partai politik. Penerapan SAP pada partai politik mungkin memerlukan penyesuaian signifikan.
3. Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik yang Diusulkan
Mengingat keterbatasan SAK dan SAP dalam konteks partai politik, beberapa ahli dan organisasi telah mengusulkan pedoman pelaporan keuangan yang lebih spesifik. Pedoman ini bertujuan untuk mengatasi karakteristik unik partai politik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.
4. Pedoman yang diusulkan biasanya mencakup elemen-elemen berikut:
Pengungkapan sumber pendanaan partai politik harus mengungkapkan semua sumber pendanaan mereka, termasuk sumbangan dari individu, perusahaan, dan pemerintah. Pelaporan pengeluaran partai politik harus dilaporkan secara rinci, termasuk pengeluaran untuk kampanye, operasional, dan kegiatan lainnya. Pengungkapan aset dan kewajiban, partai politik harus mengungkapkan semua aset dan kewajiban mereka, termasuk properti, investasi, dan pinjaman. Laporan keuangan partai politik harus diaudit oleh auditor independen untuk memastikan keakuratan dan keandalannya.
5. Regulasi Terkait
Regulasi keuangan partai politik di Indonesia diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Regulasi ini mencakup persyaratan pelaporan keuangan, batasan sumbangan, dan sanksi untuk pelanggaran. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius dalam pelaporan keuangan partai politik. Regulasi yang ada mungkin tidak cukup kuat untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas.

Celah dalam Standar dan Pedoman yang Ada

Beberapa celah utama dalam standar dan pedoman pelaporan keuangan partai politik di Indonesia meliputi, Tidak adanya standar akuntansi yang khusus untuk partai politik menciptakan ambiguitas dan memungkinkan interpretasi yang berbeda. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran standar pelaporan keuangan mengurangi efek jera. Pengawasan yang tidak memadai memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan.

Rekomendasi

Untuk mengatasi celah-celah ini, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan, standar akuntansi yang dirancang khusus untuk partai politik, dengan mempertimbangkan karakteristik unik mereka, akan meningkatkan kualitas dan relevansi pelaporan keuangan. Regulasi yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus diintegrasikan ke dalam struktur pelaporan keuangan. Pengawasan yang lebih ketat oleh badan independen akan memastikan bahwa partai politik mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Dengan mengatasi celah-celah ini dan mengadopsi standar serta pedoman yang lebih baik, partai politik di Indonesia dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi.

2. Menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik.

Sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mewujudkan good governance. Menganalisis kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik memerlukan

pemahaman tentang bagaimana regulasi yang ada dapat mewujudkan good governance. Praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria akuntabilitas dan transparansi yang semakin penting dalam tata kelola keuangan publik.

Regulasi yang mengatur keuangan partai politik di Indonesia, termasuk undang-undang yang mensyaratkan transparansi dalam pendanaan, sangat penting untuk memastikan bahwa keuangan partai dikelola secara akuntabel. Menurut Ashsyarofi, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan partai politik sangat relevan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang sering kali berkaitan dengan pengelolaan dana partai menjelang pemilihan umum. Dalam konteks ini, transparansi bukan hanya tentang menyajikan angka, tetapi juga tentang bagaimana proses pengambilan keputusan dan alur dana dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang memperkuat transparansi tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus dapat diterapkan dengan baik di lapangan.

Bentuk pengelolaan yang akuntabel dan transparan pada lembaga-lembaga pemerintah, termasuk partai politik, berperan besar dalam meningkatkan kepercayaan publik. Lewis dan Hendrawan menjelaskan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat berkaitan dengan kepercayaan dan integritas lembaga publik. Ketidakjelasan dalam penggunaan dana publik dapat menciptakan keraguan di kalangan pemilih dan akhirnya mengurangi partisipasi dalam proses demokrasi (Lewis & Hendrawan, 2019). Ini perlu dicermati karena kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dapat berkurang jika praktik pelaporan yang dilakukan tidak memenuhi standar akuntabilitas yang tinggi. Untuk mendorong perbaikan dalam praktik pelaporan, partai politik perlu menyesuaikan diri dengan regulasi yang ada dan aktif dalam memberikan laporan yang mudah dipahami oleh publik.

Penilaian terhadap praktik akuntabilitas ini juga ditopang oleh metode penelitian yang cermat. Melalui studi normatif yang mengintegrasikan analisis perpustakaan terhadap peraturan dan praktik yang berlangsung di lapangan, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran transparansi dapat berfungsi sebagai insentif yang kuat bagi partai politik untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, audit independen untuk keuangan partai politik menjadi salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis dan politik yang lebih luas, ada hubungan signifikan antara koneksi politik dan pengelolaan anggaran pemerintah. Nasih et al. menemukan bahwa koneksi politik di Indonesia dapat berpengaruh pada pengelolaan dan penggunaan anggaran, yang sering kali berujung pada pengeluaran yang tidak efisien atau korupsi (Nasih et al., 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa tanpa adanya transparansi dalam pelaporan keuangan, dana publik berisiko disalahgunakan, yang pada gilirannya membahayakan kepercayaan publik terhadap sistem politik.

Sebagai upaya untuk menjawab tantangan ini, partai politik diharapkan tidak hanya mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga secara proaktif menerapkan sistem audit dan pelaporan yang diawasi oleh pihak ketiga. Hal ini bisa menjadi langkah preventif untuk menekan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaporan dapat dikuatkan melalui partisipasi publik dalam proses pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan, seperti yang ditawarkan dalam model anggaran partisipatif yang menunjukkan dampak positif terhadap kinerja pejabat pemerintah di daerah (Usman et al., 2024).

Proses partisipasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan terhadap pengelolaan dana publik. Dengan demikian, hubungan antara pelaporan keuangan dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat berkontribusi pada terciptanya tata kelola yang baik dan kepercayaan publik yang lebih tinggi.

Kinerja partai politik dalam pelaporan keuangan juga sangat dipengaruhi oleh pola anggaran dan pengeluaran yang dikelola selama periode pemilu. Wiguna dan Khoirunurrofik mencatat bahwa pola siklus anggaran politik menunjukkan bahwa koalisi partai yang lebih kuat cenderung meningkatkan manipulasi anggaran pada tahun pemilu, mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat pada saat-saat tersebut (Wiguna & Khoirunurrofik, 2021). Penting untuk memastikan bahwa pengeluaran politik tidak menjadi alat untuk membocorkan dana publik demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Sistem pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus diintegrasikan ke dalam struktur pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa semua penggunaan dana tercatat secara akurat. Hal ini diharapkan dapat menekan risiko manipulasi dan korupsi yang sering kali terjadi dalam pengelolaan keuangan politik. Dalam konteks ini, regulasi yang mengharuskan pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik harus diperkuat agar semua pihak dapat ikut berpartisipasi dalam menilai kinerja keuangan partai politik.

Kebijakan yang memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan juga harus disertai dengan penyuluhan yang memadai kepada partai politik mengenai pentingnya pelaporan yang akurat dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk membangun budaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai. Penelitian oleh Hudaya et al. menunjukkan bahwa penggunaan laporan akuntabilitas dapat menjadi alat penting dalam peningkatan transparansi di pemerintahan lokal, yang juga dapat diaplikasikan pada tingkat partai politik (Hudaya et al., 2015).

Analisis Kesesuaian dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar utama dalam tata kelola keuangan publik yang baik. Akuntabilitas berarti bahwa entitas publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan terukur. Transparansi, di sisi lain, berarti bahwa informasi keuangan dan operasional harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.

Dalam konteks partai politik, kesesuaian praktik pelaporan keuangan dengan prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik dan mencegah korupsi. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kesesuaian tersebut:

1. Akuntabilitas

Praktik pelaporan keuangan partai politik seharusnya mencakup pengungkapan yang jelas dan terperinci mengenai sumber pendanaan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Laporan keuangan harus diaudit secara independen untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Sayangnya, praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Banyak partai politik kekurangan staf yang memiliki keahlian akuntansi yang memadai, yang menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Selain itu, pengawasan yang tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius. Pengembangan pelatihan akuntansi untuk anggota dan staf partai politik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya akuntabilitas. Penerapan sistem akuntabilitas yang kuat dapat menurunkan risiko penyimpangan dalam laporan keuangan.

2. Transparansi

Praktik pelaporan keuangan partai politik seharusnya mencakup publikasi laporan keuangan secara teratur dan mudah diakses oleh publik. Informasi yang disajikan harus relevan, andal, dan mudah dipahami. Praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia masih jauh dari ideal dalam hal transparansi. Banyak partai politik tidak mempublikasikan laporan keuangan mereka secara teratur, dan informasi yang disajikan sering kali tidak lengkap atau sulit dipahami. Regulasi yang mengharuskan pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik harus diperkuat.

Adopsi sistem akuntansi berbasis TI yang modern dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan.

Celah dan Tantangan

Beberapa celah dan tantangan utama dalam mencapai kesesuaian yang lebih baik antara praktik pelaporan keuangan partai politik dan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi meliputi, tidak adanya standar akuntansi yang khusus untuk partai politik menciptakan ambiguitas dan memungkinkan interpretasi yang berbeda. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran standar pelaporan keuangan mengurangi efek jera. Pengawasan yang tidak memadai memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan yang baik sering kali dianggap sebagai formalitas tanpa adanya niat untuk meningkatkan transparansi

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan partai politik dan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Standar akuntansi yang dirancang khusus untuk partai politik, dengan mempertimbangkan karakteristik unik mereka, akan meningkatkan kualitas dan relevansi pelaporan keuangan. Regulasi yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus diintegrasikan ke dalam struktur pelaporan keuangan. Pengawasan yang lebih ketat oleh badan independen akan memastikan bahwa partai politik mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat pelaporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap akuntabilitas.

Dengan mengatasi celah-celah ini dan mengadopsi praktik pelaporan keuangan yang lebih baik, partai politik di Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi. Akuntabilitas merupakan elemen esensial dalam demokrasi.

3. Mengidentifikasi tantangan dan celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik berdasarkan temuan dari literatur akademik dan kebijakan.

Ini memungkinkan pemetaan kendala seperti keterbatasan SDM, teknologi informasi, atau kesadaran akuntabilitas partai. Pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang berakar dari keterbatasan sumber daya manusia, masalah teknologi informasi, dan rendahnya tingkat kesadaran akuntabilitas di kalangan partai-partai politik. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan partai politik sangat penting untuk mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, masih ada celah dalam implementasi ini, di mana banyak partai yang tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola laporan keuangan secara efektif. Hal ini menciptakan tantangan dalam mendokumentasikan transaksi (Ashsyarofi, 2021).

Dalam konteks ini, adanya teknologi informasi yang tidak memadai juga menjadi hambatan yang terlihat jelas. Sistem akuntansi yang ketinggalan zaman dan kurang efisien berkontribusi pada lambatnya proses pelaporan keuangan dan meningkatkan potensi kesalahan. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam manajemen kinerja dapat meningkatkan akuntabilitas jika diterapkan dengan baik, tetapi saat ini penyerapan teknologi ini di lingkungan partai politik masih sangat terbatas (Karina et al., 2025). Kurangnya investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang tepat juga berkontribusi pada ketidakmampuan partai politik untuk menyajikan laporan keuangan yang komprehensif, yang mencakup semua sumber pendanaan dan pengeluaran dengan jelas dan akurat (Setiorini et al., 2022).

Kesadaran akan akuntabilitas di kalangan anggota partai dan pimpinan juga menjadi masalah krusial. Banyak partai politik masih beroperasi dengan paradigma lama yang tidak memberikan prioritas pada akuntabilitas finansial, dan ini diperparah oleh stigma bahwa pelaporan keuangan yang baik sering kali dianggap sebagai formalitas tanpa adanya niat untuk

meningkatkan transparansi (Ashsyarofi, 2021). Ini menciptakan iklim di mana laporan keuangan tidak dianggap penting, dan lebih sering disusun hanya untuk memenuhi persyaratan hukum. Dalam banyak kasus, hasil laporan tidak dicermati secara serius baik oleh anggota partai maupun oleh publik. Hal ini semakin memperburuk tantangan dalam meningkatkan standar pelaporan keuangan yang dapat dipercaya.

Lebih jauh lagi, interaksi antara partai politik dan industri yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah menciptakan potensi konflik kepentingan yang kerap menyebabkan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan politik dapat mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan keuangan, di mana kepentingan politik sering kali mengalahkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Meskipun ada upaya untuk menegakkan pengawasan, penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius dalam pelaporan keuangan partai politik (Rahmawati et al., 2025).

Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup penguatan regulasi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, serta adopsi teknologi informasi yang lebih baik. Misalnya, pengembangan pelatihan akuntansi yang ditujukan untuk anggota dan staf partai politik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, perhatian yang lebih besar harus diberikan untuk menerapkan kebijakan yang mendorong partai politik untuk mengikuti standar transparansi keuangan yang lebih ketat, didukung oleh sistem audit yang transparan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntabilitas yang kuat dapat menurunkan risiko penyimpangan dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Dalam konteks politik Indonesia saat ini, di mana tingkat korupsi masih sangat tinggi, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada praktik pelaporan keuangan yang lebih baik. Hal ini tidak hanya akan membantu mengurangi korupsi, tetapi juga mendukung demokrasi yang lebih sehat dengan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem politik. Ketidakpastian dan tantangan yang dihadapi oleh partai politik dalam hal pelaporan keuangan mencerminkan perlunya reformasi yang lebih besar dalam kerangka kerja akuntansi di Indonesia (Nainggolan et al., 2021). Dengan memenuhi tantangan ini, partai politik dapat berfungsi lebih efektif dalam kapasitasnya sebagai entitas demokratis, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan dalam Pelaksanaan Standar Pelaporan Keuangan Partai Politik

Berikut adalah analisis mendalam mengenai tantangan dan celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik di Indonesia:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Banyak partai politik, terutama di tingkat daerah, kekurangan staf yang memiliki keahlian akuntansi yang memadai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Pelatihan akuntansi yang ditujukan untuk anggota dan staf partai politik dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

2. Masalah Teknologi Informasi

Sistem akuntansi yang ketinggalan zaman dan kurang efisien memperlambat proses pelaporan keuangan dan meningkatkan potensi kesalahan. Investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang tepat masih sangat terbatas di banyak partai politik. Adopsi sistem akuntansi berbasis TI yang modern dan terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan keuangan.

3. Rendahnya Tingkat Kesadaran Akuntabilitas

Pelaporan keuangan yang baik sering kali dianggap sebagai formalitas tanpa adanya niat untuk meningkatkan transparansi. Laporan keuangan tidak dianggap penting dan lebih sering disusun hanya untuk memenuhi persyaratan hukum. Perlu adanya

perubahan paradigma di kalangan anggota partai dan pimpinan mengenai pentingnya akuntabilitas finansial. Penyuluhan dan sosialisasi mengenai manfaat pelaporan keuangan yang transparan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap akuntabilitas.

4. Pengawasan yang Tidak Konsisten dan Korupsi

Penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan korupsi masih menjadi masalah serius dalam pelaporan keuangan partai politik. Interaksi antara partai politik dan industri yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah menciptakan potensi konflik kepentingan yang kerap menyebabkan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Pengawasan yang lebih ketat dan mekanisme audit yang transparan harus diintegrasikan ke dalam struktur pelaporan keuangan. Regulasi yang mengharuskan pelaporan keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik harus diperkuat.

5. Kurangnya Standar yang Spesifik

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum mungkin tidak sepenuhnya sesuai untuk entitas partai politik yang memiliki karakteristik unik (misalnya, sumber pendanaan yang beragam, kegiatan non-profit). Pengembangan standar akuntansi yang spesifik untuk partai politik, dengan mempertimbangkan karakteristik unik mereka, dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pelaporan keuangan.

Celah dalam Pelaksanaan Standar

Celah-celah dalam pelaksanaan standar pelaporan keuangan partai politik sering kali muncul akibat dari, standar yang ada dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh partai politik yang berbeda, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak konsisten. Sanksi yang tidak tegas terhadap pelanggaran standar pelaporan keuangan mengurangi efek jera dan mendorong partai politik untuk tidak patuh. Sistem pengendalian internal yang lemah di partai politik memungkinkan terjadinya manipulasi dan penyimpangan dalam pelaporan keuangan.

Implikasi dan Rekomendasi

Mengatasi tantangan dan celah ini memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup, penguatan regulasi dan peningkatan kemampuan SDM. Adopsi teknologi informasi yang lebih baik. Peningkatan kesadaran akuntabilitas. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Pengembangan standar akuntansi yang spesifik untuk partai politik. Dengan memenuhi tantangan ini, partai politik dapat berfungsi lebih efektif dalam kapasitasnya sebagai entitas demokratis, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang Anda katakan, penting bagi semua pihak untuk berkomitmen pada praktik pelaporan keuangan yang lebih baik untuk mengurangi korupsi dan mendukung demokrasi yang lebih sehat.

Kesimpulan

Kesimpulannya, keselarasan praktik pelaporan keuangan partai politik di Indonesia dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik masih menjadi upaya penting namun penuh tantangan. Meskipun regulasi sudah ada, tidak adanya standar akuntansi khusus untuk partai politik, ditambah dengan penegakan hukum yang tidak konsisten, pengawasan independen yang tidak memadai, dan kurangnya kesadaran mengenai akuntabilitas, berkontribusi pada kesenjangan yang signifikan. Untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat demokrasi, penting untuk mengembangkan standar akuntansi yang disesuaikan, memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan independen, dan meningkatkan kesadaran akan akuntabilitas.

Penelitian di masa depan harus fokus pada beberapa bidang, termasuk studi perbandingan dengan negara lain untuk memahami tren global dalam keuangan politik, studi longitudinal untuk melacak evolusi praktik keuangan, dan analisis mendalam tentang dampak teknologi pada transparansi keuangan dalam organisasi politik. Selain itu, menjelajahi nuansa

budaya dan konteks regional spesifik yang memengaruhi perilaku keuangan dapat memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan sensitif secara budaya. Dengan mengatasi tantangan ini secara sistematis, partai politik dapat meningkatkan efektivitas mereka sebagai entitas demokrasi dan berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Riset mendatang juga dapat menggali lebih dalam tentang inisiatif dukungan yang disesuaikan dan dampak teknologi baru terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Referensi

- Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85(May), 102572. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Ashsyarofi, H. L. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Yang Berkaitan Dengan Keuangan Partai Politik Menjelang Pilkada 2020. *Jatiswara*, 36(1), 49–61. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i1.256>
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 295–317. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>
- Damuri, Y. R., & Day, C. (2015). Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(1), 3–27. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1016565>
- Faisal, F., Ridhasyah, R., & Haryanto, H. (2023). Political connections and firm performance in an emerging market context: the mediating effect of sustainability disclosure. *International Journal of Emerging Markets*, 18(10), 3935–3953. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-07-2020-0753>
- Gonschorek, G. J. (2021). Subnational favoritism in development grant allocations: Empirical evidence from decentralized Indonesia. *World Development*, 139, 105299. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105299>
- Gupta, A., Singh, A., Aneja, K., Aggarwal, V., Wadhwa, J., & Abraham, D. (2023). How to write a scoping review? - A comprehensive guide. *Endodontology*, 35(1), 9–14. https://doi.org/10.4103/endo.endo_123_22
- Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. *International Journal of Accounting & Information Management*, 26(1), 59–80. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2016-0086>
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017a). Political connections, related party transactions, and auditor choice: Evidence from Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, 13(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.01.004>
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017b). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Harymawan, I., Nasih, M., Suhardianto, N., & Shauki, E. (2020). How does the presidential election period affect the performance of the state-owned enterprise in Indonesia? *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1750330>
- Hendratama, T. D., & Barokah, Z. (2020). Related party transactions and firm value: The moderating role of corporate social responsibility reporting. *China Journal of Accounting Research*, 13(2), 223–236. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.04.002>
- Hudaya, M., Smark, C., Watts, T., & Silaen, P. (2015). The use of accountability reports and the accountability forum: Evidence from an Indonesian local government. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 9(4), 57–70. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v9i4.5>

- Indra, M., Artina, D., Diana, L., Tiaraputri, A., Rauf, M. A., Murniati, D., & Ningsih, R. O. (2023). The Political Law of Forest and Land Fire Management: A Case Study in Bengkalis and Meranti Islands Regency, Riau Province, Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(1), 293–302. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0024>
- Karina, R., Siti-Nabiha, A. K., & Jurnal, T. (2025). Big data integration in performance management and control: a socio-technical perspective. *Journal of Accounting & Organizational Change, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JAOC-07-2024-0238>
- Lewis, B. D., & Hendrawan, A. (2019). The impact of majority coalitions on local government spending, service delivery, and corruption in Indonesia. *European Journal of Political Economy*, 58, 178–191. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.11.002>
- Nainggolan, Y. A., Astuti, E. D., Rahadi, R. A., & Afgani, K. F. (2021). Political connection and corporate social responsibility: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 922–940. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3767.2021>
- Nasih, M., Al-Cholili, A. S. A., Harymawan, I., Haider, I., & Rahayu, N. K. (2020). Political connections, overinvestment and governance mechanism in Indonesia. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1790220>
- Ni'mah, A., Laila, N., Rusmita, S. A., & Cahyono, E. F. (2020). Determinants of Corporate Bond and Sukuk Ratings in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 689–712. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1106>
- Perdana, A., & Hillman, B. (2020). Quotas and ballots: The impact of positive action policies on women's representation in Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 7(2), 158–170. <https://doi.org/10.1002/app5.299>
- Peters, M. D. J., Marnie, C., Colquhoun, H., Garritty, C. M., Hempel, S., Horsley, T., Langlois, E. V., Lillie, E., O'Brien, K. K., Tunçalp, Özge, Wilson, M. G., Zarin, W., & Tricco, A. C. (2021). Scoping reviews: reinforcing and advancing the methodology and application. *Systematic Reviews*, 10(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/s13643-021-01821-3>
- Peters, M. D. J., Marnie, C., Tricco, A. C., Pollock, D., Munn, Z., Alexander, L., McInerney, P., Godfrey, C. M., & Khalil, H. (2020). Updated methodological guidance for the conduct of scoping reviews. *JBIM Evidence Synthesis*, 18(10), 2119–2126. <https://doi.org/10.11124/JBIES-20-00167>
- Rahmawati, W., Siregar, S. V., Shauki, E. R., & Anggraita, V. (2025). Political connections and narrative disclosure tone: the moderating role of the COVID-19 pandemic. *International Journal of Accounting & Information Management, ahead-of-p*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2023-0198>
- Sahide, A. (2022). Power Consolidation of Jokowi's Administration: The Role of the Social Media and Political Issues in Indonesian Democracy. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(1), 159–168. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0014>
- Setiorini, K. R., Rahmawati, Payamta, & Hartoko, S. (2022). The pentagon fraud theory perspective: understanding of motivation of executives to manipulate with the financial statements of a state-owned enterprise. *Economic Annals-XXI*, 194(11–12), 104–110. <https://doi.org/10.21003/ea.V194-13>
- Shalihah, F., Adhayanto, O., Indra, M., & Agusmidah. (2022). Determination of the maximum time limit on a specific time work agreement in the view of legal certainty and fairness. *Economic Annals-XXI*, 198(7–8), 40–44. <https://doi.org/10.21003/EA.V198-05>
- Slater, D. (2018). PARTY CARTELIZATION, Indonesian-STYLE: presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The effect of related party transactions on firm performance: The moderating role of political connection in

- indonesian banking. *Business: Theory and Practice*, 20(2003), 81–92. <https://doi.org/10.3846/BTP.2019.08>
- Usman, E., Haris, N., Sugianto, S., Sudirman, S., & Rustiarini, N. W. (2024). Participatory budgetary model and performance of local government officials: an Indonesian case. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 13(1), 25–41. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2024.135819>
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>
- Wiguna, G. E., & Khoirunurrofik, K. (2021). Political budget cycle patterns and the role of coalition parties in shaping Indonesian local government spending. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 5(1), 41–64. <https://doi.org/10.1007/s41685-020-00186-0>